



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

**PEMBERONTAKAN JAWARA BANTEN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN
TAHUN 1945–1946**

Syadeli

*Prodi. Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
syadeli.untirtas3@gmail.com*

To cite this article: Syadeli. (2021). Pemberontakan jawara banten pada masa awal kemerdekaan tahun 1945–1946. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(2), 173-182. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.30410>.

Naskah diterima : 14 Desember 2020, Naskah direvisi : 18 Juni 2021, Naskah disetujui : 2 Juli 2021

Abstract

“Jawara” is part of the subculture apart from “Kiai” and “ulama” which has a position in the eyes of the people of Banten. This position is not a formal labelling but an informal label which is formed by the community itself, where the “jawara” is a group that has a strong influence while penetrating the boundaries of the rural hierarchy in Banten. In the early days of independence, the “jawara” were involved in heroic events with the people of Banten fighting to regain independence from the Dutch colonial government. In the midst of this struggle there was an act of rebellion carried out by the “jawara”, where this rebellion reflected the social action of the “jawara” to oppose the situation at that time. This event is interesting to study to provide an overview of the socio-political dynamics among the people of Banten during this period. The method used in this research is to use the historical method by following the research steps, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on the results of the study, it can be concluded that the action in each rebellion that is carried out by “jawara” has its own characteristics, namely by committing various acts of violence that describe bandits. This violence is directed against people he does not like and will deter the ends of his interests. The acts of violence they commit such as kidnapping, intimidation, robbery and murder are the characteristics of the “jawara” style.

Keywords: Banten; Indonesian Revolution; Jawara; Rebellion.

Abstrak

Jawara” menempati posisi istimewa dalam masyarakat Banten. Jawara merupakan bagian subkultur dalam masyarakat Banten yang memiliki kedudukan istimewa selain “Kiai” dan “Ulama”. Posisi Jawara dalam masyarakat Banten mempunyai pengaruh kuat yang menembus batas-batas hierarki pedesaan di Banten, sehingga Jawara mendapatkan pelabelan secara informal oleh masyarakat Banten. Pada masa awal kemerdekaan, para “jawara” terlibat dalam peristiwa-peristiwa heroistik bersama masyarakat Banten berjuang merebut kembali kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Di tengah-tengah perjuangan ini terjadi aksi pemberontakan yang dilakukan oleh para “jawara”, dimana pemberontakan ini merefleksikan aksi sosial para “jawara” untuk menentang situasi pada saat itu. Peristiwa ini menarik dikaji untuk memberikan gambaran tentang dinamika sosial politik di kalangan rakyat Banten pada kurun waktu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode historis dengan mengikuti langkah-langkah penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa aksi dalam setiap pemberontakan yang dilakukan “jawara” memiliki ciri tersendiri yaitu dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan yang menggambarkan perbanditan. Kekerasan ini ditujukan terhadap orang-orang yang tidak disukainya dan akan menghalangi tujuan dari kepentingannya. Tindakan kekerasan yang mereka lakukan seperti penculikan, intimidasi, perampokan dan pembunuhan merupakan ciri khas yang menjadi gaya para “jawara”.

Kata Kunci: Banten; Jawara; Pemberontakan; Revolusi Indonesia.

PENDAHULUAN

Banten dalam lintasan sejarah Indonesia cukup dikenal karena di daerah ini pernah berkembang kesultanan Islam. Pengaruh terbentuknya kesultanan Banten melekatkan simbol-simbol keislaman yang banyak dijumpai pada berbagai aspek kehidupan di Banten, termasuk dalam pembentukan struktur pemerintahan dan masyarakatnya. Para penguasa Banten seringkali menggunakan gelar keagamaan yang dipakai untuk melegitimasi dirinya sebagai orang yang telah mencapai derajat kewalian. Karena itu ia bukan saja memiliki legitimasi kuat untuk mengurus hal-hal duniawi tetapi juga berkaitan dengan soal-soal keagamaan.

Jawara merupakan salah satu golongan dalam masyarakat Banten yang mampu menembus batas-batas hierarki pedesaan. Bagi masyarakat Banten, Jawara dianggap memiliki sejumlah keunggulan terutama keunggulan fisik dan kekuatan-kekuatan untuk memanipulasi kekuatan spiritual. Keunggulan yang dimiliki oleh Jawara menyebabkan Jawara tampil menjadi sosok yang memiliki karakter yang khas. Salah satu keunggulan yang dimiliki jawara adalah dalam penggunaan jimat. Jimat dipercaya dapat memberikan harapan dan memenuhi kebutuhan praktis para jawara, salah satunya adalah kekebalan tubuh dari benda-benda tajam, sehingga para jawara dianggap memiliki kekebalan. Sosok jawara juga terkenal dengan seragam hitamnya dan kecenderungan terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sehingga bagi sebagian masyarakat, jawara dipandang sebagai sosok yang memiliki keberanian, agresif, sompral, terbuka (blak-blakan) dan bersenjata golok, untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan fisik dan magis.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa jawara terbagi dalam dua kelompok, pertama kaum jawara yang memegang teguh ilmu agama yang disebut “Jawara Ulama”, dan kedua, kelompok yang menggunakan “*elmu hideung*” (ilmu hitam). Penggunaan istilah “*elmu hideung*” bagi orang Banten adalah ilmu kepandaian untuk memperoleh kekebalan (*kadugalan*) yang tidak berdasarkan ajaran Islam (Sunatra dalam Lubis, 2002). Meskipun menurut sejarah kerasnya jawara hanya terhadap kompeni saja. Jawara berangkat dari sikap kepahlawanan tapi dikondisikan menyimpang dari sikap itu. Ketika tidak ada lagi musuh bersama di masyarakat Banten berupa penjajah terjadi pergeseran peran jawara, awalnya sebagai tentara kiyai menjadi pemimpin dalam masyarakat sosial.

Sosok jawara juga menunjukkan corak kepahlawanan sejak jaman penjajahan. Bersama dengan para kyai dan masyarakat Banten, para jawara ikut terlibat aktif dalam upaya menumpas penjajahan Belanda. Jawara pada awalnya hadir sebagai pengawal kiai dalam membela kebenaran, Jawara adalah santri termasuk juga pengawal para kyai yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Dengan demikian jawara menempati posisi penting dalam masyarakat Banten. Jawara dengan atribut budaya dan kekhasannya masih dipertahankan dalam masyarakat Banten. Jawara merupakan bagian dari subkultur selain Kiai dan Ulama yang memiliki kedudukan di mata masyarakat Banten. kedudukan itu bukan pelabelan formal melainkan pelabelan informal yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dimana jawara adalah kelompok yang mempunyai pengaruh kuat sekaligus menembus batas-batas hierarki pedesaan di Banten.

Masyarakat Banten sangat menjaga apa yang menjadi peninggalan budayanya. Mereka juga mempertahankan peranan turun menurun pada jawara, misalnya sebagai guru silat, guru ilmu batin (*magi*), pemain debus, bahkan sebagai tentara wakaf atau biasa di sebut “*khodim kiyai*”. Dengan berjalannya kehidupan sosial dalam masyarakat Banten, aktivitas dalam komunitas jawara juga berjalan di dalamnya. Para jawara terlibat dalam peristiwa-peristiwa heroistik. Jawara bersama masyarakat Banten berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda.

Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah suatu puncak tercapainya suatu tatanan sosial politik yang mantap, tetapi lebih merupakan awal dari pencarian identitas baru yaitu untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. kenyataan membuktikan bahwa revolusi bukan saja menghasilkan kesamaan tujuan mempertahankan kemerdekaan tetapi juga konflik internal diantara individu dan kekuatan-kekuatan kelompok sosial yang ada. Konflik-konflik tersebut berwujud dalam perbedaan-perbedaan pandangan, kepentingan, latar belakang, organisasi sosial, dan tidak terorganisasinya kesatuan komando dan sebagainya (Ricklefs, 1994).

Di wilayah Banten mulai muncul gejala konflik internal tersebut sejak residen Tirtasuyatna melarikan diri dari Banten. Akibatnya jabatan residen menjadi kosong sedangkan waktu itu belum ada penunjukan sebagai gantinya (Michrob, 1993). Dalam kondisi vakum kekuasaan itu mulai ada usaha untuk mengambil alih kekuasaan oleh kelompok jawara. Pada masa awal kemerdekaan, jawara-jawara ini memiliki peranan

yang sangat penting baik sebagai pemimpin dalam perjuangan untuk melucuti tentara Jepang maupun sebagai pemimpin birokrasi. Jawara biasanya direkrut oleh ulama yang merupakan pemimpin kharismatik dalam masyarakat Banten, khususnya di pedesaan. Selain itu, para jawara seringkali bertindak sebagai pengawal pejabat desa dan pelindung milik desa dan tidak dengan sendirinya bertindak di luar hukum, namun kebebasannya secara relative dari pembatasan-pembatasan secara konvensional menyebabkan bahwa ia seorang rekrut yang potensial bagi banditisme (Reid, 1996).

Setelah runtuhnya kesultanan Banten dan tidak efektifnya kekuasaan kolonial di Banten pada abad ke-19 M mendorong munculnya peranan jawara dalam kehidupan masyarakat Banten. Setelah Daendels menghapus pemerintahan kesultanan Banten, masyarakat pribumi semakin mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini yang pada akhirnya memicu konflik di masyarakat. Di sejumlah wilayah Banten terjadi kekosongan pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik dan kekacauan dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh masyarakat khususnya para kyai.

Dari kondisi seperti inilah jawara muncul dan tampil bersama para kyai sebagai pemimpin informal masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena jawara memiliki keterampilan beladiri, silat, ilmu magis sebagai keterampilan untuk menghadapi situasi yang kacau dalam menghadapi pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda (Alamsyah, 2010). Selain itu posisi jawara sebagai murid khodam kyai dianggap relevan dalam membantu perjuangan kyai. Lain halnya dengan pendapat sejarawan Sartono Kartodirdjo, jawara muncul akibat dari hancur dan ambruknya tatanan sosial masyarakat akibat dihapusnya kesultanan sehingga memunculkan perilaku kriminal dan bandit sosial (Kartodirdjo, 1984). Selain itu para jawara memiliki paguron (padepokan silat) dan jaringan antar paguron yang kemudian menjadi basis sosial utamanya. Sebagai pemimpin informal, jawara berupaya untuk memulihkan keadaan, tidak sedikit diantara mereka kemudian ada yang berprofesi sebagai jaro, baik pada masa kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Baru bahkan sampai saat ini.

Berbagai tindakan yang mereka lakukan dengan mengandalkan agitasi, provokasi dan intimidasi terhadap orang-orang yang dianggap akan menghambat keinginannya, terutama terhadap pihak pangreh praja setempat dengan melakukan tindakan “pendaulatan”, yaitu penculikan dan pembunuhan. Kelompok jawara

mencoba melakukan revolusi sosial dengan cara menculik dan membunuh para pejabat pemerintah yang dianggap merintanginya dan menggantikan pemerintahan yang sah serta membentuk pemerintahan sendiri dengan mendirikan Dewan Rakyat yang berumur singkat yaitu dari bulan Oktober 1945 sampai Januari 1946. Sekalipun kekuasaan para jawara ini hanya sebentar, mereka meninggalkan “capnya” pada masa itu, memberikan kepada revolusi awal itu watak khususnya dan membentuk suatu hubungan yang penting antara tradisi lama pemberontakan petani Jawa dan radikalisme terorganisasi dari generasi kemudian (Anderson, 1988:367). Dalam pemberontakan tersebut, tokoh Ce Mamat menjadi simbol pemimpin “Bapak Rakyat” yang dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh besar di kalangan jawara. Sebagaimana pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sebelumnya di Banten, pemberontakan inipun tidak terlepas dari sifat dan watak yang radikal dan revolusioner serta sifat-sifat millenarian, mesianisme dan terutama nativisme.

Penulis beranggapan bahwa dalam kajian sejarah sosial terutama yang mengambil tema tentang dunia perbanditan sangat menarik untuk dikaji. Dalam pengkajian sejarah Banten juga jarang sekali mengangkat masalah ini, padahal kelompok jawara selalu mewarnai kehidupan masyarakat Banten dari dahulu hingga saat ini baik dalam dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menulis tentang jawara ini terutama tentang pemberontakan yang mereka lakukan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.

METODE

Dalam mengkaji “Pemberontakan Jawara Banten”, penulis menggunakan metode historis dengan studi literatur, dokumenter serta wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Metode historis adalah suatu proses pengkajian, penjelasan dan penganalisisan secara kritis terhadap rekaman serta penginggalan masa lampau (Gottschalk, 1975:32).

Penulis menganggap bahwa metode historis merupakan metode yang cocok dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini pada umumnya berasal dari masa lampau dan hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode ini. Metode historis mengandung empat langkah penting, yaitu :

1. Heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan penelitian. Pada tahapan ini penulis mencari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan jawara terutama pada kurun waktu kemerdekaan Indonesia.
2. Kritik, yaitu melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul baik isi maupun bentuknya. Pada tahap kritik, penulis memilih dan memilah sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji aspek validitas dan reliabilitas dari sumber yang telah didapatkan.
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang digunakan oleh penulis.
4. Historiografi yaitu merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan yang di dalamnya berisi tentang pemberontakan jawara Banten pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 – 1946

Pendekatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan multidimensional, yakni dengan melakukan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Pendekatan multidimensional seperti ini misalnya pada penulisan disertasi yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo tentang pemberontakan petani Banten. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau konsep-konsep dari ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi dan politik. Hal ini bertujuan agar dapat terungkap suatu peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh (Kartodirdjo, 1992;87).

PEMBAHASAN

Jawara dalam Masyarakat Banten

Dalam masyarakat Banten, istilah atau sebutan tentang jawara bukanlah merupakan sesuatu yang dianggap aneh, karena sebutan tersebut merupakan hal yang biasa didengar dalam percakapan sehari-hari. Sebutan untuk jawara biasanya ditujukan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dalam keahlian bermain silat dan juga kepada orang-orang yang dianggap memiliki berbagai ilmu kebatinan seperti ilmu kekebalan tubuh, ilmu pelet, ilmu bisa menghilang, ilmu perdukunan dan berbagai ilmu lain yang masih berhubungan dengan mistik. Namun demikian banyak

sekali orang yang memberikan interpretasi tentang jawara dari sudut pandang yang mereka gunakan.

Menurut bahasa, Jawara berasal dari kata juara (djoeara) yang berarti orang yang berani (Thaib,1947). Jawara adalah nama setempat untuk istilah jago, yaitu orang-orang yang sellau memainkan peranan yang penting dalam setiap kerusuhan di Banten dan sudah biasa dikejar-kejar, diawasi atau bahkan ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa (Anderson, 1988). Jawara adalah orang-orang yang sulit dikuasai oleh kepolisian dan selalu bergerak kalau ada kegentingan di masyarakat Banten (Frederick, 1984). Jawara adalah jagoan di Banten yang sudah biasa “memanfaatkan: kesenjangan antara kaum petani dan pangreh praja (Williams, 1990;61). Jawara atau jagoan adalah orang-orang yang berpengaruh katrena ditakuti seperti suatu mafia yang mengandalkan kekuatan fisik dan “kesaktian” dalam melakukan perampokan, pembunuhan dan kriminalitas (Satrio, 1986).

Dari berbagai interpretasi yang dikemukakan di atas, penulis melihat bahwa penafsiran yang mengemukakan hampir semuanya memberikan suatu konotasi yang kurang baik. Namun demikian penulis memakluminya karena dilihat dari kurun waktu tulisan (interpretasi) itu dibuat, semuanya meninjau jawara dari masa kini (setelah kemerdekaan RI). Setidaknya penulis juga bisa melihat beberapa persamaan tentang interpretasi mengenai jawara tersebut seperti kedekatan jawara mengenai hal yang berhubungan dengan sifat keberanian, anti kemapanan, berhubungan dengan magis dan tindakan kekerasan.

Tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana jawara mulai muncul dan dikenal di lingkungan masyarakat Banten. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai kalangan masyarakat Banten seperti ulama, jawara, aparat birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat setidaknya memberikan titik terang tentang hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jawara mulai muncul dan dikenal sejak jaman kesultanan Banten. Namun mereka lebih dikenal sebagai tentara atau pasukan sultan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa karakter dan sifat yang dimiliki oleh pasukan sultan itu sama dengan jawara yang biasa dikenal yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, keahlian dalam bermain silat dan juga terkadang memiliki ilmu-ilmu yang dianggap gaib seperti ilmu kekebalan tubuh, ilmu perdukunan, bahkan kepada hal yang irasional sekalipun seperti ilmu menghilang dan ilmu teluh.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jawara mulai muncul sejak mulai dihapuskannya kesultanan

Banten oleh Daendels. Kesultanan Banten dihapus oleh Daendels pada tahun 1812 (Kartodirdjo, 1988). Pendapat yang kedua ini berlandaskan pada pemikiran bahwa ketika kesultanan Banten dihapuskan, maka perlawanan terhadap kolonial tidak pernah berhenti dan dilanjutkan secara sporadis oleh berbagai kelompok masyarakat pengikut sultan Banten yang didukung oleh masyarakat. Mereka biasanya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa dan dianggap memiliki kelebihan baik dalam ilmu keagamaan (Islam) maupun ilmu peperangan yang biasa dimiliki oleh pasukan sultan seperti halnya ilmu kesaktian dalam berbagai bentuk seperti yang diungkapkan oleh pendapat yang pertama. Para pemimpin kelompok ini biasanya disamping seorang jawara juga merangkap seorang guru mengaji (Kyai) sebagai tumpuan harapan dan tempat berlindungnya masyarakat setelah sultan. Ulama telah menjadi panutan rakyat sebagai pemimpin kharismatik setelah lenyapnya pemimpin elit sultan dan elit birokrasi kerajaan (Ambary, 1988).

Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, terjadi berbagai gerakan perlawanan dari rakyat Banten. Pemimpin-pemimpin kelompok perlawanan yang ada di Banten biasanya berasal dari kalangan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih dari anggota kelompoknya terutama kemampuan dalam ilmu kanuragan (silat) dan kesaktian. Peranan seorang pemimpin dalam kelompok sangat penting apakah ia seorang *counter elite*, kepala desa atau orang kebanyakan. Perlawanan terhadap kaum kolonial di Banten biasanya dipimpin oleh seorang kyai yang sekaligus juga seorang jawara. Hal ini bisa terjadi karena hampir semua pesantren yang ada di Banten di samping sebagai tempat mempelajari ilmu agama (Islam) juga sekaligus merangkap sebagai tempat latihan ilmu silat. Dipastikan bahwa seorang kyai di Banten berperan sebagai seorang guru mengaji juga merangkap sebagai guru silat. Jawara-jawara di Banten yang menjadi pemimpin dalam kelompoknya adalah termasuk elite pedesaan dan berasal dari lapisan sosial yang berada. Mereka memiliki otoritas yang bersumber dari wibawa pribadi yang pada dasarnya berasal dari charisma yang mereka miliki.

Dari sini dapat diketahui bahwa pengikutnya mempunyai *commitment* tanpa *reserve* terhadap pimpinan sehingga tercipta solidaritas kelompok makin kuat dan tidak diragukan lagi keberadaannya (Kartodirdjo, 1987). Otoritas yang dimiliki para pemimpin "jawara" dapat digunakan untuk merekrut pengikut berdasarkan loyalitasnya pada pimpinan sehingga mereka dapat dimobilisasikan untuk tujuan tertentu yaitu melawan penguasa (penjajah). Disamping itu seorang pemimpin

jawara adalah elite kultural yang mengetahui segala seluk beluk kultur pedesaan. Ia adalah tempat bertanya semua masalah di pedesaan baik masalah yang sifatnya spiritual maupun fisik.

Pemberontakan Jawara 1945-1946

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Setelah kemerdekaan dikumandangkan dilakukan usaha-usaha dalam mensosialisasikan dan menyebarkan berita kemerdekaan tersebut ke daerah-daerah. Di Banten, muncul tanggapan dan reaksi yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah kelompok jawara yang beranggapan bahwa kemerdekaan diartikan sebagai suatu proses pembersihan Banten secara tuntas dari sisa-sisa kolonial dan unsur-unsur yang masih memiliki hubungan dengan kolonial harus dihapuskan.

Namun cara-cara yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan seperti penculikan, pendaulatan, provokasi, intimidasi, perampokan dan bahkan sampai pembunuhan. Hal ini banyak menimbulkan keprihatinan dan juga keresahan di berbagai kalangan masyarakat terutama di kalangan pemerintah, yang melihat bahwa tindakan tersebut sudah mengarah kepada tindakan pemberontakan yang ingin menggulingkan kekuasaan yang sah dan menggantinya dengan pemerintahan yang mereka inginkan. Pemberontakan Jawara Banten pada awal kemerdekaan ini tercermin dari terjadinya beberapa peristiwa seperti peristiwa Cinangka, penyerangan markas kampetai dan aksi Dewan Rakyat.

Peristiwa Cinangka dilatarbelakangi oleh situasi di Banten yang semakin memburuk secara mencolok pada tahun 1945. Kekurangan sandang pangan di kalangan masyarakat khususnya para petani yang merupakan mayoritas penduduk terlihat semakin menjadi-jadi dan cukup parah. Tanda pertama dalam peristiwa ini adalah terjadinya ketegangan sosial antara petani dengan priyayi (pamongpraja), kemungkinan akan menjadi kekacauan yang meluas kemana-mana terjadi pada bulan Agustus 1945. Waktu itu di kawedanaan Anyer sedang timbul berbagai kerusuhan yang kemungkinan akan menyebar ke daerah-daerah sekitarnya.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, para petani Cinangka mendatangi camat setempat, Tubagus Muhammad Arsyad, untuk meminta agar bahan sandang yang dia kuasai diserahkan kepada mereka. Ketika camat menolak, rumahnya segera dirampok sehingga ia kabur

ke Anyer untuk meminta bantuan kepada wedana. Wedana Anyer, Raden Sukrawardi, diantar oleh camat dan dua orang polisi datang ke Cinangka yang maksudnya untuk menenangkan masyarakat dan mengajak mereka berunding. Tetapi begitu mereka masuk ke desa, tersebut segera diserang oleh penduduk yang bersenjata tongkat. Dalam peristiwa tersebut Raden Sukrawardi terbunuh sedangkan yang lainnya dapat meloloskan diri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika 30 orang polisi bersama serdadu Jepang memasuki desa tersebut, mereka diserang dan terjadilah perkelahian secara massal yang mengakibatkan seorang polisi dan 7 orang petani tewas. Dalam banyak hal, peristiwa ini dianggap sebagai pembuka jalan dan juga awal dari rangkaian pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Banten pada awal kemerdekaan. Peristiwa tersebut telah menumbuhkan kekhawatiran pihak Jepang dan para pejabat pamongpraja setempat yang menjadi sasaran utama dalam kerusuhan tersebut.

Peristiwa berikutnya adalah penyerangan markas kampetai. Pada penyerangan ini, berbagai kelompok masyarakat Banten terlibat secara bersama-sama walaupun mereka memiliki kelompok sendiri-sendiri. Beberapa kelompok yang terlibat dominan adalah barisan pemuda dan kelompok yang menamakan dirinya dengan laskar rakyat yang terdiri dari para jawara. Para jawara yang tergabung ke dalam kelompok laskar ini ikut melakukan penyerangan terhadap markas kampetai sebagai pertahanan terakhir Jepang di Banten.

Diawali dengan aksi penurunan bendera Jepang di berbagai instansi pemerintah yang ada di Banten khususnya kota Serang sebagai pusat pemerintahan sebagai tanda penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada rakyat. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan para pejabat sipil Jepang dan juga para pegawai pamongprajanya, yang segera meninggalkan Banten menuju Jakarta. Jabatan residen dari Yuki Yoshii diserahkan kepada Raden Tirtasujatna. Namun Raden Tirtasujatna sendiri akhirnya meninggalkan Banten karena pada saat itu terjadi desas desus di masyarakat bahwa akan ada pembunuhan aparat pemerintah yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang sehingga jabatan residen menjadi kosong.

Akhirnya rakyat berinisiatif untuk mengangkat K.H. Akhmad Khatib sebagai residen Banten pada tanggal 19 September 1945 dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Banten. Tokoh K.H. Akhmad Khatib adalah seorang ulama yang cukup disegani masyarakat. Ia alumni pesantren Kadupiring, yang kemudian melanjutkan ke pesantren Caringin, keduanya berada di Pandeglang. Pada masyarakat Banten, K.H Akhmad

Khatib adalah seorang pimpinan yang paling diharapkan kelak di kemudian hari akan menggantikan kedudukan kesultanan Banten, karena ia merupakan keturunan terakhir dari kesultanan Banten yang berhak mewarisi tahta kesultanan.

Upaya yang dilakukan pertama kali adalah berunding dengan pihak kampetai agar menyerahkan kekuasaan dan senjatanya ke pihak pemerintah. Hal ini disetujui dengan catatan setelah proses evakuasi orang-orang Jepang yang ada di Banten telah berkumpul di Serang tanpa gangguan. Namun suatu insiden terjadi yang mengakibatkan Jepang membatalkan perjanjian ini. Insiden tersebut adalah BKR mengutus Abdul Mukti dan Juhi untuk melakukan penjemputan pasukan angkatan darat Jepang (*kaigun*) di Sajira Rangkasbitung, mereka dikawal 9 orang tentara Jepang. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh rakyat di lintasan jalan kereta api di Warunggunung (Michrob, 1993). Dengan pembatalan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan penyerangan. Para pemimpin pasukan dari kecamatan-kecamatan Ciomas, Pabuaran, Baros, Taktakan, Padarincang, Karamatwatu, Cilegon, dan Ciruas datang ke Kota Serang untuk membicarakan rencana rinci penyerangan itu (Michrob, 1993).

Dalam peristiwa penyerangan markas kampetai tersebut penulis melihat besarnya peran dari para jawara yang ikut serta melakukan aksi. Hal ini bisa dilihat dari keberanian dan kenekatan aksi yang mereka lakukan. Ini dibuktikan dengan luapan kemarahan yang tidak terkendali bahkan oleh kelompok pasukannya sendiri. Juga para pimpinan yang terlibat langsung seperti Salim Nonong, Soelaiman Gunungsari dan Jaro Kamid. Gema takbir yang berkumandang dan menyertai pemberontakan tersebut merupakan suatu ungkapan dalam mengagungkan kebesaran Allah dengan senantiasa mengharap ridho-Nya dan perlindungan-Nya dalam perang jihad yang mereka lakukan melawan orang-orang yang dianggap kafir dan harus disingkirkan. Pada situasi ini terjadi konflik internal terutama terjadi setelah K.H. Akhmad Khatib mulai mengumumkan susunan aparat pemerintah di seluruh wilayah Banten. K.H. Akhmad Khatib tetap mempertahankan para bupati di tiga kabupaten yaitu Serang, Pandeglang dan Lebak. Alasannya didasarkan bahwa tenaganya masih bisa dipakai dan mereka dianggap memiliki kecakapan dalam menjalankan pemerintahan. Susunan aparat ini ternyata menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian rakyat Banten, terutama di kalangan para pimpinan jawara. Mereka berpendirian bahwa dalam penyusunan pemerintahan di Banten harus dihapuskan segala unsur kolonial karena mereka adalah

para pengkhianat dan harus dilenyapkan. Kelompok jawara ini dipimpin oleh Ce Mamat, seorang jawara yang pernah dibuang ke Boven Digul karena terlibat pemberontakan PKI tahun 1926. Dengan ketidakpuasan tersebut, Ce Mamat berusaha menghimpun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang lama. Namun begitu, kedudukan K.H. Akhmad Khatib akan tetap dipertahankan karena disamping kharisma yang dimiliki dalam masyarakat, kemungkinan akan terjadi pergolakan yang lebih besar terjadi kalau ia diganti. Jadi yang akan diturunkan adalah pamongpraja yang merupakan orang-orang lama yang berkuasa pada masa kolonial Belanda dan Jepang.

Ternyata keberadaan dewan rakyat ini bukannya menentramkan masyarakat melainkan membuat rakyat kebingungan karena harus kepada siapa mereka menuruti perintah. Terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu di satu pihak ada residen dan di pihak lain ada Dewan Rakyat yang lebih mendominasi pemerintahan. Terjadi pula keresahan di masyarakat karena keberadaan pasukan Dewan Rakyat ternyata membuat masyarakat ketakutan disebabkan oleh berbagai aksi perampokan dan perampasan mereka terhadap penduduk. Penulis melihat dengan adanya gerakan dewan ini sebenarnya gerakan kelompok jawara mulai terpolarisasi menjadi dua kekuatan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para pimpinan jawara terhadap situasi politik yang berkembang pada saat itu. Terjadi persaingan antara kelompok Soekarno dengan kelompok Tan Malaka yang berimbas juga ke daerah-daerah termasuk juga ke Banten. Jadi keberpihakan jawara selama ini kepada rakyat mulai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang punya ambisi tertentu untuk berkuasa di Banten.

Aksi dewan rakyat akhirnya ditumpas dengan tertangkapnya Ce Mamat dan para pimpinan yang lainnya seperti Alirakhman dan Ahmad Bassaif. Selanjutnya adalah pembubaran Dewan rakyat beserta seluruh unsur yang ada. Dengan tertangkapnya Ce Mamat dan dibubarkannya Dewan Rakyat maka segera pemerintahan dikembalikan kepada K.H. Akhmad Khatib.

Penulis berpendapat dengan adanya penumpasan terhadap gerakan Dewan Rakyat tersebut terlihat bahwa ulama bagi masyarakat Banten lebih mendapat tempat dibandingkan dengan jawara. Tidak menutup kemungkinan bahwa konotasi yang negatif terhadap jawara dalam pandangan masyarakat Banten berkembang setelah terjadinya pemberontakan ini, karena sebelumnya masyarakat Banten tidak pernah memandang jawara sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini menunjukkan mulai ada pergeseran pandangan

terhadap keberadaan jawara dalam masyarakat Banten pasca peristiwa pemberontakan jawara yang dipimpin Ce Mamat. Karena keberadaan jawara yang selama ini cenderung untuk “netral” telah terpengaruh oleh anasir-anasir politik yang ada pada saat itu, yang cenderung merugikan. Sehingga penulis bisa melihat kenapa dewasa ini istilah atau sebutan jawara dalam masyarakat Banten cenderung berkonotasi negatif.

Kajian Kritis Terhadap Pemberontakan Jawara

Pemberontakan jawara Banten sebagai salah satu peristiwa gerakan sosial di Indonesia tidak terlepas dari ideologi gerakan yang ada dan berkembang dalam masyarakat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Baik ideologi gerakan yang bersifat tradisional sebagaimana yang lazim diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo (1984) dengan tipologi gerakan sosial, yaitu millenarianisme, messianisme, nativisme dan perang suci maupun ideologi yang bersifat transisi sebagaimana diungkapkan oleh Cribb (1990) yang menerangkan tentang aspek-aspek ideologi tradisional yang diikuti dengan masuknya ideologi yang lebih modern.

Aspek millenarianisme menunjukkan suatu jaman yang menyatakan bahwa semua ketidakadilan akan diakhiri, dan keharmonisan akan dipulihkan. Dalam peristiwa pemberontakan jawara Banten pada awal kemerdekaan Indonesia ditandai dengan disembarkannya berita tentang kemerdekaan RI dari belenggu penjajahan. Berita ini baru bisa diterima oleh masyarakat Banten tiga hari setelah peristiwa proklamasi dikumandangkan karena keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi yang ada serta situasi Banten pada saat itu masih berada dalam penjajahan Jepang. Masyarakat Banten mempercayai bahwa setelah sekian lama hidup dalam masa penjajahan akan datang masa dimana masyarakat Banten akan mendapatkan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi penjajah yang selama ini memperlakukan masyarakat secara tidak adil dan sewenang-wenang.

Aspek messianisme sebagai salah satu dari ideologi gerakan sosial yang menerangkan tentang harapan akan munculnya seorang messias yang akan menjadi juru selamat bagi masyarakat yang akan menetapkan keadilan dan perdamaian dalam suatu masyarakat yang telah mengalami kekacauan. Dalam peristiwa pemberontakan jawara banten, messias ditandai dengan munculnya tokoh K.H Akhmad Khatib sebagai seorang “Ratu Adil”. Masyarakat Banten menganggap K.H Akhmad Khatib sebagai seorang tokoh yang bisa diterima untuk menyelamatkan masyarakat Banten pasca kemerdekaan Indonesia.

Aspek nativisme dalam gerakan protes sosial menunjukkan keinginan akan adanya suatu masyarakat yang bersih dari pengaruh asing dan keinginan untuk menghidupkan kembali keadaan pra jajahan dan hadirnya suatu dinasti. Penulis pahami sebagai suatu sikap ingin mengembalikan kejayaan masa lalu atau mendirikan suatu kekuasaan baru yang berasal dari kalangan pribumi. Ada hal menarik yang dapat dilihat oleh penulis dari aspek nativisme di Banten, yaitu beberapa tokoh jawara ternyata memanfaatkan kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat Banten dalam meaknai istilah pribumi.

Para elit jawara seperti Ce mamat dan Sulaiman Gunungsari beserta pendukungnya berusaha melakukan propaganda untuk menanamkan perasaan fanatisme kedaerahan untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini menghalang-halangi atau menghambat ambisinya untuk meraih kekuasaan di Banten. Usaha yang dilakukan adalah dengan menyebarkan isu anti Priangan dalam masyarakat Banten yang memang diakui pada saat itu sangat sensitif terhadap hal yang bersifat “kepribumian”. Sifat kepribumian yang dipahami oleh masyarakat Banten lebih merupakan sifat kedaerahan yang lebih sempit. Sehingga banyak pejabat di Banten yang berasal dari Priangan yang meninggalkan tugasnya karena kselematannya terancam.

Penulis melihat bahwa pemanfaatan anti Priangan ini lebih merupakan ambisi politik dari beberapa tokoh jawara dengan memanfaatkan situasi setempat yang sedang kacau. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit tokoh-tokoh Priangan ini juga banyak berpihak pada masyarakat Banten terutama dalam perjuangan mengusir penjajaha, seperti Raden Tirtasuyatna dan Zulkarnaen Surya Kartalegawa. Jadi dalam setiap kesempatan dan momentum sekecil apapun, beberapa tokoh jawara selalu memanfaatkannya untuk kepentingan kelompoknya. Penulis melihat ada tujuan-tujuan tertentu dari para elit jawara dengan berlindung di balik keberpihakan mereka terhadap masyarakat Banten.

Aspek “banditisme” sebagaimana dikemukakan oleh Hobsbawm (1984), Sartono Kartodirdjo (1988) dan Suhartono (1993) merupakan salah satu aspek yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat pedesaan sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Banten. Perbanditan dianggap sebagai suatu cara dari suatu keyakinan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang merupakan lawan-lawan yang akan menghalang-halangi pelaku banditisme yang juga terkadang melawan atau melanggar tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat. Suasana perbanditan di Banten bisa dilihat dari berbagai peristiwa pemberontakan

terhadap kaum kolonial Belanda yang dimulai dari awal abad ke-19. Dilihat dari pelaku perbanditan di Banten terutama dilakukan oleh orang-orang baik perorangan maupun kelompok yang biasa dikenal dalam masyarakat banten dengan sebutan jawara.

Pada masa pasca kemerdekaan, jawara banyak terlibat dalam usaha untuk meraih ambisi kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan upaya dari beberapa elit jawara dan para pengikut setianya untuk merebut kekuasaan di Banten dengan jalan menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tentunya dengan berbagai upaya untuk menarik simpati masyarakat setempat agar mendukung mereka. Jadi pada masa tersebut sudah ada pergeseran dari jawara yang tidak mempunyai kepentingan dan ambisi menjadi jawara yang dipenuhi dengan kepentingan dan ambisi untuk meraih kekuasaan. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan cara provokasi dan intimidasi seperti penyebaran isu anti non-pribumi, penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawannya yang dianggap akan menghalang-halangi jawara untuk berkuasa.

Masa ketika Indonesia baru merdeka, para jawara banyak yang melakukan pekerjaannya lebih karena dipengaruhi oleh factor-faktor dan situasi politik yang berkembang pada saat itu dan lebih berorientasi pada kekuasaan sehingga bisa digolongkan ke dalam kategori bandit politik. Namun sebenarnya mereka hanya dijadikan alat oleh kepentingan politik tertentu yang lebih dominan. Srgumentasi ini didasari oleh data yang penulis peroleh tentang terjunnya kelompok jawara ke dalam perpolitikan di Banten pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan dan keruhnya kehidupan politik di tingkat nasional yang juga berpengaruh di daerah-daerah lain khususnya di Banten. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh Ce Mamat dan kawan-kawan dari elit jawara yang terpengaruh dengan ideologi komunis. Dengan tindakan nyata mereka membentuk Dewan Rakyat dan tentara sendiri seperti Polisi Jawara dan Laskar Gulkut, sebagai pengganti Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tindakan ini jelas merupakan wujud dari penentangan mereka terhadap pemerintahan yang sah dan diakui secara nasional.

Fenomena sekarang ini jawara lebih merupakan kelompok masyarakat yang cenderung untuk memanfaatkan sifat kejawaraannya dengan “menjual” tenaganya kepada orang-orang yang mau membayarnya, untuk menjadi pelindung atau pengawal, *debt collector*, dan tenaga yang setiap saat dibutuhkan oleh yang membayarnya, yang tentunya dengan harga yang telah disepakati. Jawara ini memang tidak mempunyai

pekerjaan lain kecuali menjual tenaganya sebagai satu-satunya sumber penghidupan mereka.

SIMPULAN

Jawara Banten mulai muncul dan dikenal luas di kalangan masyarakat terutama setelah keruntuhan kesultanan Banten. Keberadaan mereka pada saat itu sangat dominan sebagai kelompok masyarakat yang terkenal karena pembangkangannya terhadap kaum kolonial. Hampir dalam setiap keributan dan kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat, jawara selalu mengambil peranan yang penting terutama kerusuhan dalam melawan dan mmebrontak terhadap kaum kolonial. Karenanya jawara sering menjadi musuh utama bagi kaum kolonial karena dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sering menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Namun dalam masyarakat Banten pada saat itu tidak jarang mereka dianggap sebagai pahlawan karena keberpihakannya terhadap rakyat.

Pemberontakan di Banten pada masa awal kemerdekaan lebih merupakan suatu ungkapan dari keinginan masyarakat Banten untuk keluar dari kesengsaraan akibat penindasan yang selama ini mereka alami. Aksi mereka dengan cara merebut kekuasaan dan membersihkan Banten dari sisa-sisa kaum kolonial dan aparat birokrasi yang selama ini dianggap sebagai pengikut kaum kolonial. Bagi jawara, hal ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk membalas segala perlakuan kaum kolonial yang telah menjadikan mereka kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh sebab tindakan diskriminatif dan intimidatif dari kaum kolonial terhadap jawara.

Aksi dalam setiap pemberontakan yang dilakukan jawara memiliki ciri tersendiri yaitu dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana yang diistilahkan oleh Hobsbawm dengan istilah perbanditan. Kekerasan ini ditujukan terhadap orang-orang yang tidak disukainya dan akan menghalangi tujuan dari kepentingannya. Tindakan kekerasan yang mereka lakukan seperti penculikan, intimidasi, perampokan dan pembunuhan merupakan ciri khas yang menjadi gaya mereka.

REFERENSI

Anderson, B. (1988). *Revolusi pemuda, pendudukan jepang dan perlawanan di jawa 1944- 1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

- Adiyanto, E. (2015). Pemuda dan perubahan sosial-politik di banten (1926-1955). *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.
- Adas, Michael. 1988. *Ratu adil: tokoh dan gerakan milenarian menentang kolonialisme eropa*. Jakarta: Rajawali Press
- Ekadjati, Edi S, Et all. (1987). *Monumen perjuangan rakyat jawa barat*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Fitriah, A. (2019). Oyok djumaiyah: pejuang perempuan banten masa revolusi tahun 1945-1949. *Doctoral dissertation*, UIN SMH BANTEN.
- Frederick, W. H dan Soeroto, S. (1984). *Pemahaman sejarah indonesia sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta : LP3ES
- Ghazali, Z. (1995). *Sejarah lokal: kumpulan makalah diskusi*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan
- Gilang, M. I. (2016). Local history in developing patriotism (study on the history of the physical revolution in banten 1945-1949). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 2(1), 37-44.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Guillot, K. C. (2009). Membaca sejarah banten dari sumber Asing. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 7(2), 313-330.
- Hobsbawm, J.C. (1984). Bandit sosial, dalam Kartodirdjo, Sartono. *kepemimpinan dalam dimensi sosial*. Yogyakarta: LP3ES
- Hudaeri, M, dkk (2003). Tasbih dan golok: studi tentang kharisma kyai dan jawara di Banten. *Jurnal Istiqro*, 2(1), 57-87.
- Ismaun. (1992). *Pengantar ilmu sejarah*. Bandung : IKIP
- Kamilah, H. (2019). Peran kh. ahmad khaerun pada masa revolusi di tangerang tahun 1945-1946. *Doctoral dissertation*, UIN SMH BANTEN).
- Karomani. (2008). Prasangka jawara terhadap ulama dan umaro di banten selatan. *Al Qalam*, 25(3), 391-403.
- Laura, R., & Waluyo, L. S. (2019). Komunikasi non verbal dalam budaya banten (studi etnografi komunikasi pada jawara banten). *Global Komunika*, 1(1), 66-75.
- Leirissa, R. Z., Ambary, H. M., Lopian, A. B., Rauf, M., & Gonggong, A. (2001). *Banten masa revolusi 1945-1949 proses integrasi dalam negara kesatuan republik Indonesia*.
- Lubis. N. H. (2004). *Banten dalam pergumulan sejarah*. Jakarta: LP3S

- Lubis, N. H. (2005). *Apa dan siapa orang banten*. Serang: Biro Humas Setda Provinsi Banten
- Shofariyanto, A. (2017). Pemberontakan dewan rakyat di banten (1945). *Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suharto, S. (2009). Banten pasca agresi militer belanda kedua. *Makara Hubs-Asia*, 13(2), 85-90.